

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS:
KALURAHAN PENGKOK KAPANEWON PATUK KABUPATEN
GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA)**



Disusun oleh:

**DEVRASIA NURYANI MAJO
19510008**

**PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS:
KALURAHAN PENGKOK KAPANEWON PATUK KABUPATEN
GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA)



Disusun oleh:

DEVRASIA NURYANI MAJO
19510008

PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2023



HALAMAN PENGESAHAN


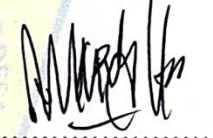

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jumat, 16 Juni 2023

Waktu : 11:30 WIB

Tempat : Ruang Prodi Pembangunan Sosial STPMD “APMD”, Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si. Ketua Penguji/Pembimbing	
Drs. Oelin Malyatoro, M.Si. Penguji Samping I	
Dr. Sri Widayanti, S.Pd.,M.A. Penguji Samping II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Pembangunan Sosial


Dra. MC Candra Rasmala Dibyorini, M.Si



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devrasia Nuryani Majo

NIM 19510008

Program Studi : Pembangunan Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMETASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KALURAHAN PENGKOK, KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA” adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk adalah saya nyatakan benar.

Yogyakarta, 18 Juni 2023

Yang menyatakan



Devrasia Nuryani Majo

19510008

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas berkat, anugerah, rahmat, dan kesehatan yang telah diberikan Tuhan Yesus Kristus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Untuk diri saya sendiri terimakasih sudah berjuang sampai dititik ini. Terimakasih sudah mau bersama-sama melewati banyak rintangan yang saya takuti. Kedepannya harus seperti ini tetap semangat, dan akan berhasil meskipun sambil menangis.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Papa Antonius Engga dan Mama Oliva Elu. Terima kasih untuk semua doa, didikan, kerja keras, usaha dan dukungan yang sangat besar dan istimewa bagi saya selama mengerjakan skripsi ini. Meskipun tahun 2019 dulu papa tidak mengizinkan saya untuk kuliah di Yogyakarta, karena tidak mau anak gadisnya tinggal jauh dari keluarga. Tapi saya bisa membuktikan ke Papa dan Mama bahwa saya bisa menjaga diri dan menyelesaikan semua tugas yang kalian beri. Papa dan Mama harus sehat terus Tuhan Yesus Selalu menjaga kalian.
3. Kedua adik tercinta saya, Febrian Gonsa dan Turibius Elvan Engga, terimakasih selalu menjadi adik-adik terbaik diseluruh dunia, meskipun sering meresahkan saya kalau setiap awal bulan. Terimakasih selalu mendoakan Enu, kalian berdua semangat juga menuntut ilmu.
4. Untuk kakek dan nenek saya, Ema Bene Jondo, Ene Mar dan Ene Ena, terimakasih selalu mendukung dan mendoakan cucu kesayangan kalian untuk menyelesaikan

tugas akhir ini. Terimakasih juga untuk uang jajannya yang dikasih tanpa mama dan papa tau hehehe.

5. Untuk semua keluarga besar saya di Pandu, Manggarai Timur NTT. Terimakasih untuk semua dukungan serta doanya bagi saya saat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Untuk sahabat terempong dan paling heboh sepanjang masa, Nofi Falaka, Ayu Maran, Suster Dian Tumeang, Suster Devita Nola, dan Suster Leonarda Aran. Terimakasih besti-bestiku untuk semua hal yang kita lewati bersama. Semoga kita akan ketemu lagi nanti setelah masa perkuliahan kita selesai.
7. Untuk teman terbaik saya diperantauan ini, Yuni Andios, Cindi Murni dan Nur Karimah terimakasih selalu mendengar curhat, tangisan saya setiap mengeluh tentang skripsi, dan selalu mensupport saya.
8. Untuk patner saya Hilarius Adriand Tupen Suban yang membantu dan memberikan dukungan.
9. Untuk semua teman-teman kelas Pembangunan Sosial angkatan tahun 2019, terimakasih sudah menjadi teman-teman terbaik selama 4 tahun ini dan juga sudah mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Pak Lurah beserta staf dan Ibu Retno sekeluarga di Kalurahan Pengkok, yang sudah membantu saya dalam semua hal yang saya butuhkan, terimakasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

MOTTO

(Ulangan 31:86)

“Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau”

(Yesaya 41:10)

“Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat berlimpah dan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul DIY.

Penyusunan skripsi ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat menjadi sarjana Strata 1 Program Studi Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Selain itu, dalam penulisan ini peneliti berharap skripsi ini dapat dipergunakan sebagai bacaan atau referensi untuk menambah ilmu pengetahuan prodi Pembangunan Sosial.

Skripsi berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul DIY”. Dalam penulisan skripsi yang dibuat penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa diperbaiki dikemudian hari. Tercapainya skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Ibu Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si selaku Ketua Prodi Pembangunan Sosial
3. Ibu Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan dukungan dan pembelajaran yang sangat luar biasa, perhatian, serta ketulusan dalam membimbing dan memberikan banyak nasihat sungguh luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Oelin Malyatoro, M.Si. selaku dosen penguji I yang sudah memberikan dukungan dan saran selama sidang dan selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Widayanti, S.Pd.,M.A. selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan kritik, saran, serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Staf Dosen Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” yang telah mendidik dan membimbing serta mendukung penulis selama belajar dan sampai selesainya penulisan skripsi ini
7. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya mahasiswa Pembangunan Sosial angkatan 2019 yang turut menempa penulis dan menjadi sahabat dalam berjuang belajar serta memurnikan motivasi penulis menjadi seorang pewarta di zaman yang penuh peluang dan tantangan.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya hingga penulisan skripsi ini selesai pada waktunya.

Penulis menyadari keterbatasan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis terbuka akan saran dan kritik dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 07 Juli 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devrasia'.

Devrasia Nuryani Majo

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori.....	8
1. Implementasi.....	8
2. Program Keluarga Harapan.....	12
3. Kesejahteraan Masyarakat	19
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3. Informan	27

4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisis Data.....	30
BAB II	32
DESKRIPSI WILAYAH	32
A. Gambaran Umum Wilayah	32
1. Sejarah Kalurahan Pengkok	32
2. Potensi Umum.....	33
3. Perkembangan Kependudukan.....	37
4. Ekonomi Masyarakat	42
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	43
6. Sarana dan Prasarana.....	45
7. Pemerintahan Kalurahan Pengkok	46
B. Data Program Keluarga Harapan	49
1. Jumlah Padukuhan Menerima Bantuan PKH.....	49
2. Jumlah Penerima Bantuan.....	50
3. Nominal Bantuan Yang Diterima.....	54
BAB III.....	56
ANALISIS DATA.....	56
A. Deskripsi Informan	56
B. Implementasi PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	60
1. Kegiatan Sebelum Implementasi Program Keluarga Harapan.....	62
2. Komunikasi Aparat Kalurahan, Pelaksana KPM PKH.....	69
3. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan.....	74
C. Hambatan Dalam Implementasi PKH.....	82
1. Kurangnya Kordinasi antara Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Pusat	83
2. Hambatan Yang Dialami KPM PKH	84

3. Hambatan Yang Dirasakan Pendamping PKH	85
BAB IV	87
PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN FOTO	x
PEDOMAN WAWANCARA	x

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Model Implementasi Kebijakan	11
Gambar II.2 Peta Kalurahan Pengkok.....	33
Gambar II.Peta Kapanewon Patuk	34
Gambar II.3 Peta Kabupaten Gunung Kidul	34
Gambar II.4 Struktur Organisasi Pemerintahan	47
Gambar II.5 Struktur Organisasi Karang Taruna	49

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Padukuhan Wilayah Kalurahan Pengkok	35
Tabel II.2 Luas Penggunaan Tanah.....	36
Tabel II.3 Jumlah Yang Menempuh Pendidikan.....	38
Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	40
Tabel II.5 Umat beragama.....	41
Tabel II.6 Tanaman Pangan Menurut Komoditas	44
Tabel II.7 Fasilitas Pendidikan.....	45
Tabel II.8 Tabel Nominal Penerimaan Bantuan PKH.....	55
Tabel III.1 Profil Informan Aparat Desa/Kalurahan Pengkok	56
Tabel III.2 Profil informan Pendamping dan Ketua PKH.....	58
Tabel III.3 Profil Informan dan Nominal Bantuan.....	59
Tabel III.4 Data Peserta PKH Kalurahan Pengkok Dalam Tahapan.....	80

DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK

Diagram II.1 Jumlah penduduk Tahun 2022	38
Diagram II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	39
Diagram II.3 Kepala Keluarga Kalurahan Pengkok	41
Diagram II.4 Penerima Bantuan PKH.....	50
Diagram II.5 Padukuhan Ngembes	51
Diagram II.6 Padukuhan Pengkok	52
Diagram II.7 Padukuhan Kalinampu	53
Diagram II.8 Padukuhan Srumbung.....	53
Grafik II.1 Pengangguran Berdasarkan Angkatan Kerja Dan Usia	42
Grafik II.2 Kesejahteraan Keluarga	42
Grafik II.3 Padukuhan Ngerancahan.....	54
Grafik II.4 Padukuhan Panjatan	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan bisa diartikan sebagai permasalahan manusia yang bisa menghambat suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam mencegah terjadinya permasalahan ini, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia jika masyarakat ingin hidup layak. Kesejahteraan sosial bukan lagi ide baru di Indonesia karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Kebutuhan material, spiritual, masyarakat Indonesia harus ditangani agar dapat mengalami kesejahteraan sosial.

Indonesia sendiri tidak lepas dari perbudakan kemiskinan, hal ini dikarenakan meningkatnya pengangguran, upah minimum yang tidak memadai dan standar hidup orang miskin. Menjadi miskin adalah masalah yang menimpa semua negara-negara, terutama di negara-negara berkembang. Permasalahan kemiskinan bukan berarti orang-orang di negara maju tidak menyaksikan dan mengalami kemiskinan. Kemiskinan mencerminkan adanya ketimpangan hasil pembangunan. Pada dasarnya kemiskinan adalah suatu kondisi dimana taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah tidak dapat ditanggung secara ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (dalam Supardal 2007) ukuran kemiskinan secara umum dibagi menjadi dua yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak adalah suatu kondisi individu atau

masyarakat yang benar-benar tidak mempunyai nilai-nilai tertentu. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ada hubungannya dengan ketidakadilan, kemiskinan muncul karena ada hubungan dengan pola dan struktur organisasi sosial dan pola pengaturan institusional di daerah atau pedesaan. Supardal (2007) menyatakan bahwa struktur adalah model-model organisasi sosial yang mantap, luas, stabil, dan mampu diperbarui (*selfreproducing*). Berbicara tentang kemiskinan struktur, maka tidak terlepas dengan lembaga-lembaga yang ada, hubungan sosial, pola hierarki, pola diskriminasi, sifat dualistis, pola-pola asimetris, dan pola-pola ketergantungan yang tumpang tindih dalam pembagian kekuatan dan cenderung bersifat eksploitatif.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia, pemerintah merumuskan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial. Program ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan pendapatan bersyarat, kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia, telah meluncurkan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal secara internasional, dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT), ini terbukti cukup berhasil dalam mengatasi kemiskinan khususnya kemiskinan kronis di negara-negara tersebut. Ide mengenai CCT muncul di kawasan Amerika Latin pada tahun 1990-an, kemudian menyebar ke negara-negara berkembang lainnya. Saat ini, setidaknya terdapat 63 negara yang melaksanakan program CCT, termasuk Indonesia melalui Program

Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2007 (World Bank, 2018). Dwi Apriani dalam Media Indonesia mengatakan bahwa, bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) atau *conditional cas transfer* (CCT) dijadikan praktik terbaik dan dijadikan contoh bagi negara lain. Pemerintah Nigeria dan 14 negara lainnya akan mencontoh program tersebut sebagai penanggulangan kemiskinan. Selain Nigeria sejumlah negara yang telah menetapkan CCT antara lain Brazil dan Kenya.

Proses pembuatan kebijakan PKH sendiri tidak lepas dari konteks politik, ekonomi, dan sosial-budaya di Indonesia pada masa itu. Yaitu krisis keuangan dan urgensi untuk melakukan reformasi kebijakan subsidi BBM yang dinilai tidak berkelanjutan. Transfer kebijakan berperan penting dalam memperkenalkan alternatif baru dan mendorong terjadinya reformasi kebijakan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang dimaksud dengan Peraturan Menteri : Program Keluarga Harapan, juga dikenal sebagai PKH adalah program untuk keluarga kurang mampu dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan orang miskin, diproses oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, bantuan sosial bersyarat pada kondisi tertentu.

PKH dijalankan untuk melaksanakan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga lain terlibat dalam pelaksanaan PKH. Keberhasilan pelaksanaan PKH sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian

dan lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka membantu pelaksanaan PKH di daerah-daerah yang belum dianggarkan oleh pemerintah pusat, perlu adanya dukungan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, serta penganggaran yang diambil dari APBD. Kelembagaan PKH mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH yang bertujuan membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/pelayanan kesehatan (faskes) dan anak-anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di tempat tinggal mereka. Manfaat PKH saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial. Jumlah KPM PKH terus bertambah sejak diperkenalkan pada tahun 2007. Mulai tahun 2007, PKH terus dikerahkan di 7 provinsi. Menurut Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tahun 2020, PKH telah dilaksanakan di 34 provinsi dan meliputi 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan. (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021).

Misi besar PKH, untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia, sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa Badan Pusat Statistik (BPS) 2016. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan, untuk menurunkan jumlah penduduk miskin,

menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Susanto, 2019).

Program Keluarga Harapan dilaksanakan diberbagai daeran di Indonesia salah satunya ialah Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewah Yogyakarta. PKH di Kalurahan Pengkok telah ada sejak Tahun 2016 hingga tahun 2023 dengan jumlah 228 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Pada observsi awal dengan beberapa narasumber menyatakan bahwa adanya ketidakadilan dalam pemilihan calon KPM PKH sehingga terjadinya tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi salah satu yang menarik perhatian peneliti, sehingga tertarik untuk melihat bagaimana PKH dilaksanakan di Kalurahan Pengkok apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan melihat permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Implemetasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewah Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka, rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul DIY?

2. Apa hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul DIY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul DIY.
- b. Untuk memahami hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul DIY.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Akademis

- 1) Dapat memahami Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat agar dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya.
- 2) Dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa program Pembangunan Sosial untuk memahami tentang pelaksanaan PKH
- 2) Dapat dijadikan bahan untuk pengetahuan penelitian tentang proses yang dilalui dalam menyelesaikan isu atau permasalahan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Dapat digunakan sebagai informasi dan masukan didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) selanjutnya

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian yang menjadi wadah bagi teori-teori yang akan dibahas dalam kaitannya dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Penjelasan berikut dapat didasarkan pada teori-teori yang sudah ada. Hal ini dikarenakan, kerangka teoritis dibentuk untuk mendukung validitas penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

1) Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan (KBBI Online, Diknas, 2009). Sementara itu, berdasarkan penggunaannya implementasi adalah tindakan, tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. (Mulyadi, 2015). Gordon (dalam Mulyadi, 2015) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang berwenang untuk mencapai tujuan program. Kebijakan yang berbeda dari yang direncanakan.

Pasalong (dikutip dalam Schinder dan Ingram, 2017) mengatakan bahwa hal ini disebabkan adanya bias dalam implementasi kebijakan yang menjadi isu penting yang harus disikapi oleh pelaksana dengan harapan agar pembuatan kebijakan dapat berhasil dilaksanakan. Berdasarkan asal usul kata, implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi adalah proses interaktif antara menetapkan tujuan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, inti fundamental dari implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai dalam rantai kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan (Junanah et al., 2022).

Afiful Ikhwan (2014) menyatakan bahwa terdapat empat unsur yang hendaknya di pertimbangkan untuk diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kegiatan yang mengandung unsur antara lain :

- a. sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya
- b. adanya proses
- c. hasil yang ingin di capai
- d. menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Selain itu, adapun pengertian implementasi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Var Meten dan Var Horn

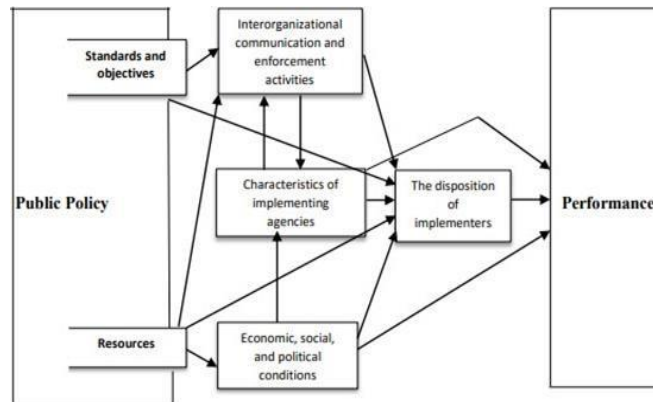
Van Meter dan Van Horn (dikutip dalam Agustino, 2008) mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya keinginan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tingkatan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian

sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai, saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Van Meter and Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan keduanya mengandaikan bahwa suatu implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan (Junanah et al., 2022). Model fundamental, menurut Meter and Horn, menggabungkan enam variabel yang menjelaskan korelasi antara kebijakan dan kinerja. Adapun variabel-variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja tersebut adalah:

- a) Standard dan tujuan (standards and objectives)
- b) Sumber daya (keuangan dan resources)
- c) Karakteristik organisasi pelaksana (characteristics of the implementing agencies)
- d) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (interorganizational communication and enforcement activities)
- e) Sikap para pelaksana (disposition of implementors)
- f) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (economic, sosial and political conditions).

Faktor-faktor tersebut selain terkait dengan kinerja kebijakan, juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Model implementasi yang dikemukakan Van Meter and Van Horn dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar I.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

b. Menurut Edwar III

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama, yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakianialah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari jika suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua ialah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik (Junanah et al., 2022).

2. Program Keluarga Harapan

1) Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga miskin yang memenuhi salah satu kriteria yang terdiri dari anak usia 0 sampai 21 tahun, ibu hamil/nifas, lansia diatas 70 tahun dan disabilitas berat (Nazira et al., 2022).

PKH merupakan program bantuan sosial bagi keluarga miskin. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk membantu pengentasan kemiskinan. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. PKH merupakan program yang dimulai pada tahun 2007. Melalui PKH, keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan akan mendapatkan bantuan dana untuk jangka waktu tertentu. PKH adalah bantuan yang membantu keluarga miskin mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, asuhan dan pendampingan keperawatan. PKH adalah langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Banyak masyarakat menganggap PKH adalah kelanjutan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, faktanya PKH berbeda dengan BLT.

Dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk mempunyai akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara

berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Sendari, 2021).

Pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga lain terlibat dalam pelaksanaan PKH. Keberhasilan pelaksanaan PKH sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian dan lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka membantu pelaksanaan PKH di daerah-daerah yang belum dianggarkan oleh pemerintah pusat, perlu adanya dukungan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah, serta penganggaran yang diambil dari APBD. Kelembagaan PKH mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021).

2) Tujuan Program Keluarga Harapan

Mengurangi kemiskinan, mengakhiri siklus kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku yang tidak bermanfaat bagi kesejahteraan kelompok kurang mampu adalah tujuan utama PKH, guna mempercepat pencapaian tujuan Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, PKH bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM

- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batin) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin (Pedoman Umum PKH 2013).

3) Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan

Menurut standar BPS, penerima PKH adalah RTSM dan memenuhi satu atau lebih kriteria. Standar bagi penerima ialah Bayi, anak antara usia 5 dan 7 tahun yang belum mulai sekolah dasar, siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan anak-anak di bawah usia 20 tahun serta yang berusia antara 15 dan 18 tahun yang belum menyelesaikan sekolah dasar. Penggunaan PKH dimaksudkan untuk meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan, dengan sasaran ibu atau wanita dewasa, atau bisa juga nenek yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dalam keluarga yang bersangkutan sebagai penerima manfaat.

Kartu Peserta PKH mencantumkan nama ibu/istri pengasuh anak, bukan nama kepala rumah tangga. Jika dana dari program PKH ditarik dari kepala keluarga, bantuan tersebut tidak boleh digunakan untuk kebutuhan anak dan dapat disalahgunakan untuk kebutuhan lain seperti pembelian rokok atau yang lainnya.

4) Ketentuan Penerima Program Keluarga Harapan

Penerima manfaat PKH dibedakan menurut komponennya: kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Kesehatan

a) Ibu hamil/nifas/menyusui

Wanita hamil/nifas/menyusui adalah keadaan seseorang yang memulai hidup baru dengan jumlah kehamilan dan/atau menyusui yang terbatas.

b) Anak usia dini

Anak Usia Dini merupakan anak dengan rentan usia 0 sampai 6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum sekolah.

b. Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan adalah anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah anak yang berusia antara 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dan berpendidikan sederajat SD/MI atau SMP/MTs dan/atau SMA/MA.

c. Kesejahteraan Sosial

a) Lansia

Lansia terdaftar di kartu keluarga yang sama dan milik keluarga.

b) Penyandang Disabilitas Berat

Orang dengan kebutuhan khusus berat ialah mereka dikarenakan cacatnya tidak bisa menjalani kehidupan mandiri sepanjang hidup dan terdaftar di kartu keluarga yang sama serta bertempat tinggal di keluarga yang sama.

(Pedoman Pelaksanaan PKH 2021).

5) Besaran Bantuan Penerima Program Keluarga Harapan

Bantuan Sosial PKH Tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan komponen, dan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bantuan tetap untuk setiap keluarga

Reguler	: Rp. 550.000, / keluarga / tahun
PKH AKSES	: Rp. 1.000.000, / keluarga / tahun

b. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH

Ibu Hamil	: Rp. 3.000.000
Anak Usia Dini	: Rp. 3.000.000
Anak SD	: Rp. 900.000
Anak SMP	: Rp. 1.500.000
Anak SMA	: Rp. 2.000.000
Lansia 70 lebih	: Rp. 2.400.000
Disabilitas	: Rp. 2.400.000

Pada implementasi program keluarga harapan tentu saja ada pihak yang terlibat. Strategi Pemerintah tersebut menurut Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tanggal 21 September 2007 tentang “Tim Pengelola Program Keluarga Harapan” Nomor: 31/KEP/MKESRA/IX/2007, sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki akses ke layanan sosial mendasar di

bidang kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan, dan dukungan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) secara berkelanjutan.

Keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya membawa sinergi antara sistem jaminan sosial dan pemberdayaan di berbagai negara untuk membantu mengatasi kemiskinan. Moderator merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program PKH. Karena keberhasilan Pendamping merupakan keberhasilan PKH secara keseluruhan, maka diperlukan adanya lembaga pendukung untuk mendukung kelancaran program PKH di tingkat kecamatan, termasuk operasionalisasi UPPKH (pendamping) di tingkat kecamatan. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki anggaran tertinggi dibandingkan dengan program lain yang didanai pemerintah dan disponsori oleh Kementerian Sosial di bidang sosial ekonomi. (Andre Kusumawardani, 2021).

Direktorat Jenderal Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjuk pendamping PKH, yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan lulus tes seleksi, untuk mendampingi peserta PKH. Ini didasarkan pada kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu. :

- a. Sebagian besar peserta PKH memiliki kemampuan yang terbatas untuk memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya sebagai peserta PKH dan hak-hak lain yang terkait dengan

program tersebut. Komplementaritas disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. B: RASKIN, BSM (KIP), JKN-Kesehatan (KIS), PSKS, KUBE, UEP, Perumahan Layak Huni.

- b. Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas UPPKH Pusat/Daerah dalam mengidentifikasi dan melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH serta menelusuri dan menyelesaikannya dalam waktu singkat.
- c. Sekretariat Kecamatan UPPKH bertempat di kantor kecamatan, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berkantor pusat di sana atau di lokasi lain yang dipilih oleh Pemerintah Daerah. (Buku pendamping, 2015).

3. Kesejahteraan Masyarakat

1) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah, salah satu cita-cita luhur dan tujuan dari negara yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia. Widyastuti (2012) menjelaskan bahwa sejahtera sendiri diartikan sebagai keadaan dimana orang-orang dalam kondisi yang makmur, alam keadaan yang sehat, dan damai sehingga agar dapat mencapai kondisi tersebut, seseorang membutuhkan suatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kata “Kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, 1991) berasal dari kata Sejahtera yang berarti aman, sentosa, dan makmur. Sedangkan “Kesejahteraan” itu sendiri adalah hal atau

keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran.

Ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, menyatakan bahwa : “Kesejahteraan hidup ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spriritual yang diikuti rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin, yang bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Maka dengan itu, pengertian dari kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu kehidupan dalam lingkungan masyarakat yang mana terlepas atau terhindar dari kemiskinan sehingga akan tercipta rasa aman dan jauh dari kerusuhan ataupun terhindar dari kesulitan dan terpenuhnya kebutuhan hidup baik jasmani, rohani maupun kebutuhan lainnya.

2) Ukuran Kesejahteraan

Menurut Sumardi dan Erves (1982) faktor yang paling umum digunakan untuk tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat atau keluarga adalah sebagai berikut:

- a) Mempunyai pendapatan
- b) Terpenuhinya pangan
- c) Keadaan rumah

- d) Terpenuhinya sandang
- e) Kesehatan
- f) Pendidikan

Sedangkan indikator kesejahteraan keluarga menurut Badan Kordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) yang dilansir dari website BKKBN adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Prasejahtera (Sangat Miskin)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

- a) Makan 2 kali sehari
- b) Memiliki pakaian berbeda untuk aktivitas (misalnya dirumah, bekerja, sekolah dan lain-lain)
- c) Tingkat kesehatan yang selalu dijaga
- d) Rumah layak huni
- e) Lingkungan bersih dan sehat

b. Keluarga Sejahter I

Dapat menanggapi satu atau lebih indikator termasuk:

- a) Indikator ekonomi
 - i. Paling tidak keluarga makan 3 kali sehari
 - ii. Setahun sekali paling kurang seluruh keluarga memperoleh pakaian baru

iii. Luas lantai rumah paling tidak mencukupi untuk aktivitas sehari-hari

b) Indikator non ekonomi

i. Ibadah teratur

ii. Sehat tiga bulan terakhir

iii. Punya penghasilan tetap

iv. Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

v. Anak sekolah terpenuhi pendidikannya

c. Keluarga Sejahtera II

Merupakan keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu kehidupannya meliputi:

i. Memiliki tabungan keluarga

ii. Makan bersama sambil berkomunikasi

iii. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)

iv. Meningkatkan pengetahuan agama

v. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah

vi. Menggunakan sarana transportasi

d. Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi :

i. Memiliki tabungan keluarga

ii. Makan bersama sambil berkomunikasi

iii. Mengikuti kegiatan masyarakat

- iv. Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
 - v. Meningkatkan pengetahuan bersama
 - vi. Menggunakan sarana transportasi
 - vii. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
- e. Keluarga Sejahtera III Plus

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- i. Seluruh kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan melimpah
- ii. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- iii. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan
- iv. Model pembangunan manusia (<https://www.bkkbn.go.id/>, 2011)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau serangkaian prosedur yang akan diambil peneliti untuk menemukan dan menyelidiki data mengenai tindakan yang diusulkan. Metodologi penelitian ini mencakup desain gambar penelitian, metode dan prosedur yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan untuk penelitian, sumber data, dan langkah-langkah yang terlibat dalam pengumpulan data. Secara umum, prosedur penelitian dicirikan sebagai pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan aplikasi yang jelas.

1. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada dasarnya, penelitian kualitatif dilakukan dalam setting alami dan informasi yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Meskipun menurut Sugiyono (2009), definisi penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mempelajari keadaan tempat yang alami, berbeda dengan eksperimen yang peneliti sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data dilakukan secara segitiga (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif ditekankan. pentingnya generalisasi (Pasalong, 2020)

Pasalong (2020) mengatakan bahwa, penelitian kualitatif lebih didasarkan pada filosofi fenomenologis yang menekankan pada penghayatan (*verstehen*). Dengan pendekatan kualitatif, perspektif peneliti sendiri digunakan untuk memahami dan mengevaluasi signifikansi interaksi kejadian perilaku manusia dalam waktu tertentu.

Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, ataupun kelompok tertentu dalam menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam suatu masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pasalong (2020) bahwa penelitian deskriptif yaitu penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya.

2. Ruang Lingkup Penelitian

1) Objek Penelitian

Kunci untuk memecahkan tantangan penelitian adalah memahami subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, DIY menjadi subjek penelitian ini.

2) Defenisi Konsepsional

a. Implementasi

Seperti yang diketahui bahwa, pengertian dari implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang agar tercapainya sebuah program. Dalam implementasi tentunya terjadi sebuah kegiatan dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Terjadinya suatu implementasi tentunya memiliki faktor-faktor tertentu. Implementasi pada dasarnya harus mempunyai sasaran dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaannya.

b. Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan ialah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau dengan kata lain keluarga penerima manfaat yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dalam pemberian bantuan tentunya harus sesuai dengan target dan sasaran yang tersedia. PKH juga, diberikan dengan tujuan yang jelas. Dalam pelaksanaan program keluarga harapan didampingi oleh pengurus yang telah diberikan dan ditugaskan oleh pemerintah.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh negara. Dikatakan sejahtera bila masyarakat memiliki hidup yang makmur dan tercukupi atau dengan kata lain kebutuhan hidup terpenuhi. Suatu kehidupan sejahtera, merasa kehidupan disekitarnya memiliki rasa aman, dan dijauhi dari segala ancaman dan kericuhan. Kesejahteraan bukan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan jasmani saja, melainkan terpenuhinya juga kebutuhan rohaniah dan sosial.

3) Defenisi operasional dan indikator

Definisi operasional merupakan pernyataan dalam bentuk khusus dan itu adalah kriteria dapat diuji secara empiris. Dengan adanya definisi operasional dapat mengukur, menghitung ataupun mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Istilah "definisi operasional" mengacu pada komponen penelitian yang memberikan instruksi tentang cara mengukur variabel

tertentu. (Pasalong, 2020). Defenisi oprasional dan indikator dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat merupakan:

- a. Kegiatan Yang Ditetapkan Sebelum Implementasi Program Keluarga Harapan
- b. Proses Implementasi Program Keluarga Harapan
- c. Hambatan Dalam Pengimplementasian Program Keluarga Harapan

3. Informan

Infoman adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang akan dilakukan. Subjek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Aparat Kalurahan

Ada dua orang aparat Kalurahan sebagai subjek penelitian ini yaitu Lurah dan Kasi Pelayanan.

- b. Pelaksana Program Keluarga Harapan

Ada satu orang yang menjadi subjek yaitu pendamping atau pelaksana PKH

- c. Penerima Program Keluarga Harapan

Ada lima orang orang yang menjadi subjek pada penelitian ini, yaitu keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH)

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis dari gejala yang diselidiki. Karena observasi adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data ketika diatur secara metodis, dicatat sesuai dengan tujuan penelitian, dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik mengumpulkan data melalui observasi dipakai apabila penelitian berkaitan atas tingkah manusia, aktivitas, fenomena alam dan banyaknya informan tidak terlalu besar (Pasalong,2020). Pengamatan dilakukan dengan tujuan, tentunya sangat berpengaruh dengan penelitian yang akan kita lakukan. Observasi dilakukan secara langsung dengan melihat lokasi dan permasalahan yang ada secara langsung.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi satu kali ke lokasi penelitian dan lainnya mencari informasi lewat handphone. Pengamatan dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2022. Pada saat melakukan pengamatan ataupun observasi peneliti sudah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pihak Kalurahan yaitu bapak Sugit selaku Lurah. Aktivitas yang dilakukan saat pengamatan itu sendiri terjadi selama 4 sampai 5 jam. Yang mana peneliti menanyakan tentang permasalahan dan fenomena-fenomena dari penelitian yang akan peneliti lakukan di lokasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya.

Dua bentuk data yang berbeda, yaitu data sekunder dan data primer, digunakan dalam penelitian ini. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui percakapan langsung dengan sumber awal. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak

langsung, dari sumber lain, atau dari penelitian sebelumnya. Data sekunder sendiri biasanya merupakan data seperti statistik, serta dokumentasi digital ataupun arsip-arsip resmi. Berikut yang menjadi data sekunder yaitu, jurnal dan website Kalurahan Pengkok.

b. Wawancara

Pasalong, (2020) mengatakan bahwa wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). Tujuan dilakukan wawancara untuk menggali informasi yang relevan untuk tujuan penelitian. Banyak cara yang dilakukan untuk wawancara, ada yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka ada juga yang dilakukan menggunakan media telepon dan alat elektronik lainnya.

Peneliti dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara yaitu dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Tujuan pendekatan ini, agar informan yang akan ditemui bisa meluangkan waktunya. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara terstruktur yang mana sudah direncanakan dan disiapkan sebaik mungkin. Wawancara yang dilakukan peneliti semuanya dilakukan secara langsung berhadapan dengan waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan oleh peneliti dan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara lain dalam mencari informasi dan bisa diperoleh dan disimpan dalam surat, dokumen-dokumen, arsip foto, video, foto-foto dan jurnal lain sebagainya. Data-data yang tersimpan bisa dipakai untuk mengali informasi dimasa yang akan datang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang dipakai dalam proses mengumpulkan data agar memperoleh informasi. Dengan kata lain analisis data ditunjukkan untuk memperoleh dan mendapatkan informasi. Data yang dikumpulkan bersumber dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Sri Muhammad Kusumantoro (2019) menjelaskan bahwa pengolahan data kualitatif melibatkan empat langkah, yaitu:

a) Pengumpulan data

Pada tahap awal, yang dikenal sebagai pengumpulan data, peneliti mengumpulkan semua informasi yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara. Data yang didapatkan akan dikumpulkan lalu disiapkan untuk rencana selanjutnya. Peneliti sudah melakukan observasi dan juga wawancara untuk mengumpulkan data tentang implementasi PKH di Kalurahan Pengkok Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul DIY.

b) Reduksi data

Pada tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi data merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Dalam tahap ini, peneliti mulai

melakukan refleksi untuk menentukan kategorisasi berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dipisahkan dari yang terpenting, kurang penting dan tidak penting. Data yang tidak penting kemudian dibuang. Sehingga kemudian data yang lainnya lebih mudah diproses.

c) Display data

Pada tahap display data, hasil reduksi dan klasifikasi ditampilkan dalam bentuk matriks berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian data yang telah dikelompokkan dimasukkan berdasarkan kategori yang sesuai untuk mempermudah proses analisis.

d) Penarikan kesimpulan dan saran

Jika hasil display data menunjukkan bahwa informasi yang diterima cukup dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, kesimpulan dapat ditarik dari teori dan hasil lapangan (Pratama, 2020). Kesimpulan sendiri pada penelitian ini, terletak pada bagian akhir. Setelah menganalisis semua data yang ditemukan pada lokasi penelitian.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Wilayah

1. Sejarah Kalurahan Pengkok

Berdasarkan laman website Kalurahan Pengkok menyatakan bahwa, sebelum berdiri menjadi pemukiman dan Kalurahan, Pengkok merupakan wilayah Kalurahan yang merupakan kawasan hutan lebat. Seorang pertapa, bernama Tohjoyo, konon menjadi orang pertama yang membuka lahan hutan cukup lebat dan angker karena belum ada satupun yang berani menghuni. Babat alas ini tidak terlepas dari di mulainya wilayah sekitarnya seperti Semoyo dan Jatimulyo salah satu desa di Kecamatan Dlingo, Bantul. Berkemampuan batin, Tohjoyo meminta bantuan makhluk gaib yang kemudian dikenal dengan sebutan “Wong Ireng” untuk membantu babat hutan memulai kehidupan wilayah ini. Karena hutannya sangat dikenal angker, wong ireng membantu Tohjoyo mengusir roh-roh yang selama ini tinggal. Wong Ireng ini juga membantu Tohjoyo membangun akses jalan wilayah untuk memulai kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, peran Tohjoyo dan Wong Ireng sebagai cikal bakal sejarah dimulainya desa Pengkok.

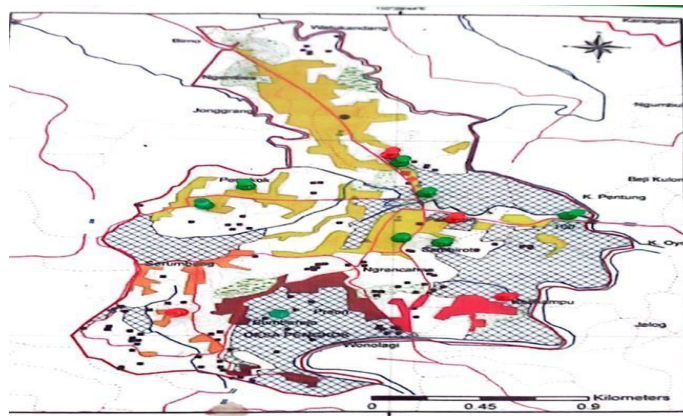
Berbagai pihak di Kalurahan Pengkok kini masih terus berkaya sumber dan alur sejarah Tohjoyo dan Wong Ireng ini. Termasuk untuk melihat ada tidaknya keterkaitan dengan adanya bukit bertamak hitam yang di sebut Gunung Ireng yang kini tengah dirintis sebagai wisata kalurahan. Warga Pengkok juga mengabadikan

sejarah cerita rakyat dan cikal bakal ini menjadi satu identitas seni tradisional Wong Ireng yang sering ditampilkan dalam acara-acara tertentu warga juga sedang melacak sejarah Lurah Pengkok pertama Kromorejo yang juga diyakini nama lain dari Tohjoyo. Lurah kedua yang bernama Kromosentoyo, Lurah ketiga Kasbi Sastro Wiharjo alias Hardjo Djuwono yang kemudian menjadi abdi dalem Kraton Yogyakarta Hadiningrat bergelar KRT Prajaningrat. Lurah keempat Marsidi Harjowardoyo, Lurah kelima Awali Harjo Suwarno, Lurah keenam Hardjo Sukarto. Setelah itu Lurah ketujuh Djumiran, dan kedelapan adalah Badarudin yang sudah memasuki masa purna tugas sejak 2014. Sudah setahun terakhir Kepala Pemerintahan Kalurahan Pengkok dijabat sementara oleh Kabag Pembangunan Slamet dan baru awal Juni 2015 digantikan oleh Lurah baru yakni carik Sudaryani, kemudian tahun 2016 terpilih Lurah pak Sugit.

2. Potensi Umum

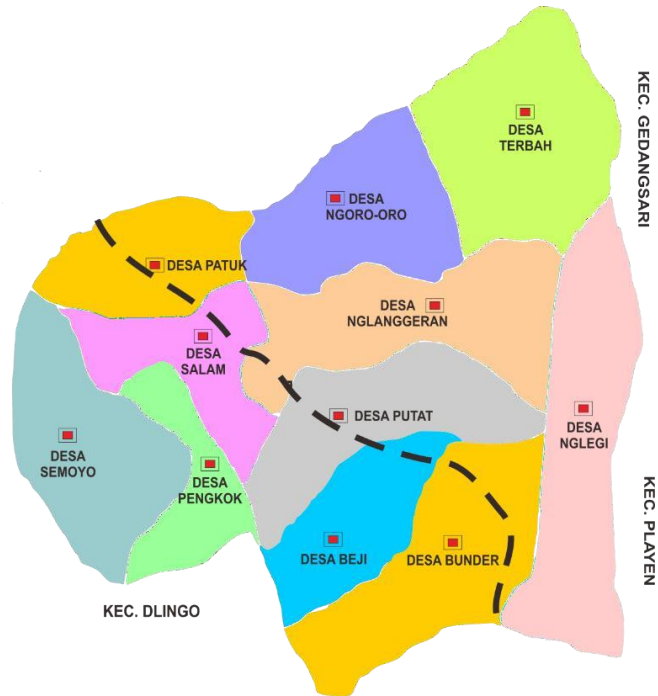
a. Letak wilayah

1) Kalurahan Pengkok



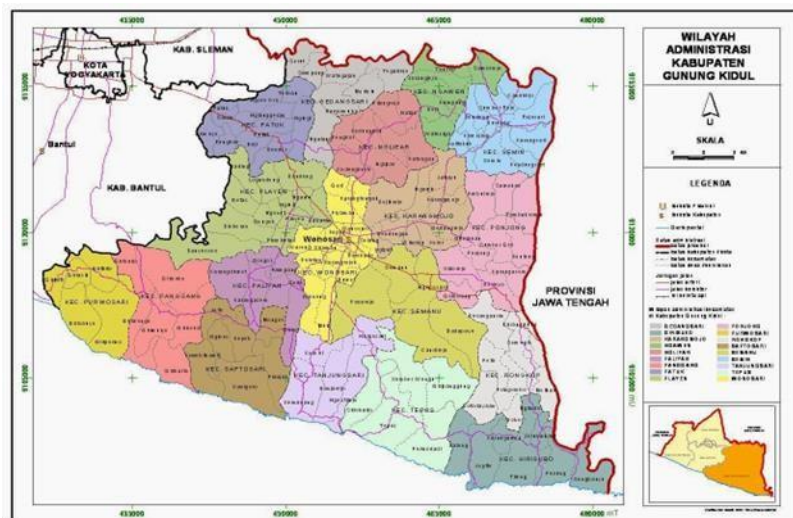
Gambar II.1 Peta Kalurahan Pengkok

2) Kapanewon Patuk



Gambar II.2 Peta Kapanewon Patuk

3) Kabupaten Gunung Kidul



Gambar II.3 Peta Kabupaten Gunung Kidul

b. Batas Wilayah

Menurut profil sumber Kalurahan Pengkok, itu adalah salah satu Kalurahan administratif yang terletak di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baris berikut mendefinisikan wilayah Kalurahan Pengkok:

- a) Bagian Utara, berbatasan dengan Kalurahan Salam Kapanewon Prambanan.
- b) Bagian Selatan, berbatasan dengan Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen.
- c) Bagian Timur berbatasan dengan Kalurahan Beji Kapanewon Gendangsari.
- d) Bagian Barat berbatasan dengan Kalurahan Semoyo Kapanewon Piyungan.

Selain batas wilayah berikut juga ada daftar tabel 6 padukuhan yang berada di Kalurahan Pengkok beserta pembagian wilayah RT dan RW, yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1 Padukuhan Wilayah Kalurahan Pengkok

No	Nama Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Kalinampu	1	4
2.	Ngembes	1	6
3.	Ngrancahan	1	6
4.	Panjatan	1	5
5.	Pengkok	1	4
6.	Srumbung	1	4
Jumlah		6	29

Sumber data: Kalurahan Pengkok tahun 2022

Secara umum, Kalurahan Pengkok ialah desa dengan tipologi persawahan, Meskipun ada beberapa wilayah padukuhan dengan jenis tanah liat, namun secara umum masih sangat produktif untuk pertanian dan perkebunan.

c. Wilayah Berdasarkan Penggunaan

Pada tabel berikut ini, merupakan luas wilayah menurut penggunaannya di Kalurahan Pengkok yang diambil dari sumber data skunder yaitu website Kalurahan sendiri, Yaitu sebagai berikut:

Tabel II.2 Luas Penggunaan Tanah

No	JENIS PENGGUNAAN	LUAS/HA
1.	Luas Tanah Sawah	424,86
2.	Luas Tanah Kering	625,72
3.	Luas Tanah Basah	0,00
4.	Luas Tanah Perkebunan	11,57
5.	Luas Tanah Fasilitas Umum	272,45
6.	Luas Tanah Hutan	0,42
Total luas		1.335,02

Sumber data: Profil Kalurahan Pengkok 2022

Berdasarkan tabel ii.2 diatas, menjelaskan bahwa, luas wilayah menurut penggunaannya, ada enam jenis penggunaan yaitu luas tanah sawah dengan 424,86 Ha, yang meliputi : sawah irigasi teknis seluas 322,50 Ha, sawah irigasi setengah teknis 101,91 Ha, sawah tadah hujan 0,33 Ha, dan sawah pasang surut 0,12 Ha. Selanjutnya luas tanah kering, yang meliputi tegal/ladang seluas 113,53 Ha, pemukiman 297,20 Ha, dan pekarang 214,99 jadi total keseluruhannya 625,72 Ha. Berikut ada luas tanah basah yang meliputi: tanah rawa, pasang surut, lahan gambut,dan situ/waduk/danau

dengan luas 0,00 Ha. Selanjutnya luas tanah perkebunan yang meliputi : tanah perkebunan rakyat, tanah perkebunan negara, tanah perkebunan swasta dengan luas 0,00 Ha, tanah perkebunan perorangan 11,57 Ha, jadi total keseluruhan 11,57 Ha.

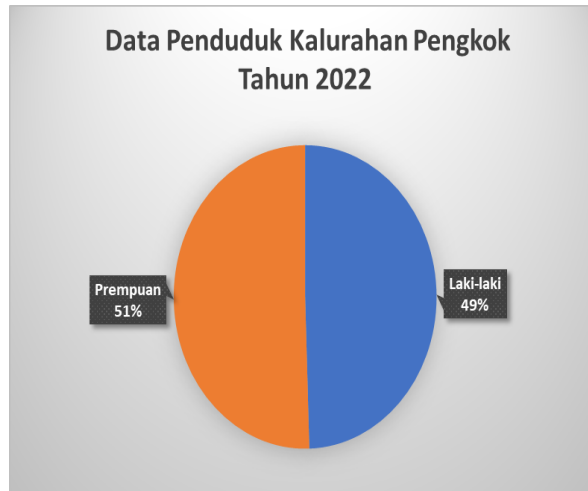
Berikutnya luas fasilitas umum yang meliputi : Kas Desa/Kelurahan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu, Tanah bengkok 158,75 Ha, Tanah titi sara 0,00 Ha, Kebun desa 0,00 Ha, Sawah desa 0,00 Ha. Lalu, Lapangan olahraga 111,77 Ha, Perkantoran pemerintah 0,49 Ha, Ruang publik/taman kota 0,00 Ha, Tempat pemakaman desa/umum 1,04 Ha Tempat pembuangan sampah 0,00 Ha, Bangunan sekolah/ perguruan tinggi 0,00 Ha, Pertokoan 0,00 Ha, Fasilitas pasar 0,00 Ha, Terminal 0,00 Ha, Jalan 0,00 Ha, Daerah tangkapan air 0,00 Ha, Usaha perikanan 0,40 Ha, dan Sutet/aliran listrik tegangan tinggi 0,00 Ha, maka total luas 272,45 Ha. Lalu yang terakhir ada luas tanah hutan yang meliputi : Hutan mangrove 0,42 Ha.

3. Perkembangan Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diterima dari Kalurahan Pengkok pada tahun 2022 sejumlah 3524 jiwa yang terdiri dari 1744 pria dan 1780 jiwa wanita.

Diagram II.1 Jumlah penduduk Tahun 2022



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

b. Jumlah Penduduk Yang Menempuh Pendidikan

Berikut ini akan menampilkan data tentang tingkat pendidikan anak-anak dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, D1-D3, S1 dan SLB. Data-data tersebut dibuat dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel II.3 Jumlah Yang Menempuh Pendidikan

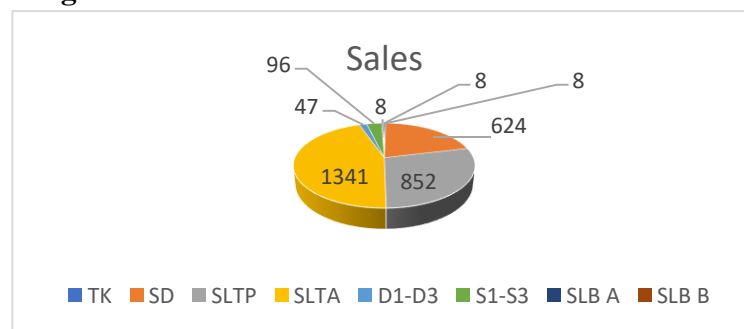
No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	18	24
2.	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	174	202
3.	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	322	331
4.	Tamat SD/ sederajat	241	269
5.	Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	15	9
6.	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	9	3
7.	Tamat SMP/ sederajat	431	421
8.	Tamat SMA/ sederajat	384	304
9.	Tamat D-1/ sederajat	20	27
10.	Tamat S-1/ sederajat	47	49
11.	SLB A	2	0
12.	SLB B	2	0
Jumlah		3.304	

Sumber data: Profil Kalurahan pengkok, 2022

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Dalam rangka pembangunan daerah perlu mengetahui adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa mengukur kualitas tenaga kerja yang tersedia dan dapat mengisis kesempatan kerja sesuai dengan keahlian masing-masing setiap tenaga kerja. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut : TK sejumlah 376 orang, SD 624 orang, SLTP 852 orang, SLTA 1341 orang, D1-D3 47 orang, S1-S3 96 orang, SLB A 6 orang, SLB B 6 orang, maka total keseluruhannya adalah 3.340 orang.

Diagram II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan sangat penting untuk diketahui, hal ini dikarenakan dengan begitu bisa mengetahui seberapa besar masyarakat yang telah bekerja dan belum bekerja, serta dapat mengetahui ada berapa jenis pekerjaan yang diminati oleh masyarakat dalam wilayah itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu : Petani,

Peternak, Guru swasta, PNS, Pensiunan, TNI/POLRI, Buruh bangunan, Bidan swasta, Jasa 97 Wiraswasta/pedagang, Buruh, Buruh tani dan lain-lainnya.

Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	841
2.	Peternak	3
3.	Guru Swasta	5
4.	PNS	49
5.	Pensiunan	55
6.	TNI/Polri	7
7.	Buruh Bangunan	7
8.	Bidan Swasta	2
9.	Jasa	97
10.	Wiraswasta/Pedagang	296
11.	Buruh	316
12.	Buruh Tani	63
13.	Lain-Lain	428

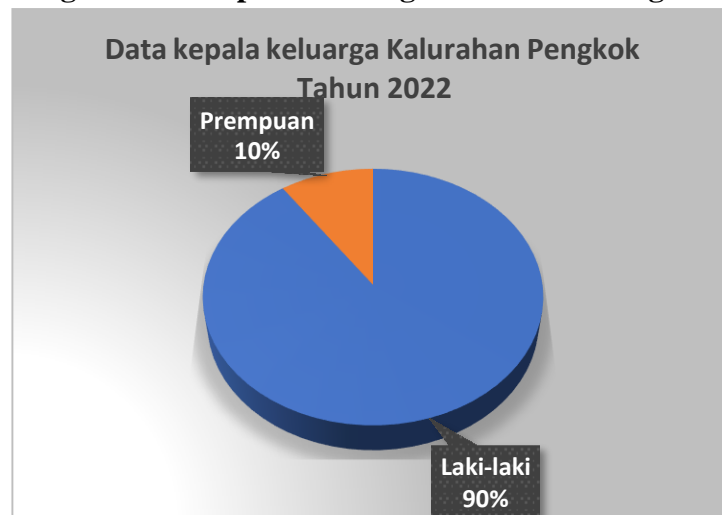
Sumber data : Profil Kalurahan Pengkok 2022

Berdasarkan tabel ii.4 diatas menjelaskan tentang jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan yaitu penduduk dengan pekerjaan paling banyak yaitu Petani sebanyak 841 orang, disusul lain-lain sebanyak 428 orang, pekerjaan yang ketiga Buruh sejumlah 316 orang, keempat Wiraswasta/Pedagang 296 orang, kelima Jasa sebanyak 97 orang, keenam Buruh tani 63 orang, ketujuh Pensiunan sebanyak 55 orang, kedelapan PNS sebanyak 49 orang, kesembilan Buruh Bangunan, kesepuluh TNI/Polri, kesebelas Guru swasta sebanyak 5 orang, keduabelas sebanyak 3 orang dan yang terakhir ketigabelas dan yang menjadi pekerjaan penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 2 orang ialah Bidan Swasta.

e. Jumlah Keluarga

Selain jumlah penduduk data yang diperoleh adalah jumlah kepala keluarga. Pada tahun 2022 di Kalurahan pengkok terdiri atas 1010 kk laki-laki dan 109 kk perempuan yang menjadi kepala keluarga, jadi total keseluruhannya 1119 kk.

Diagram II.3 Kepala Keluarga Kalurahan Pengkok



Sumber data : Profil Kalurahan Pengkok 2022

f. Agama/Aliran Kepercayaan

Berbicara tentang kepercayaan, masyarakat Kalurahan Pengkok juga memiliki kepercayaan. Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat Kalurahan Pengkok menganut dua agama yakni Islam dan Kristen. Jumlah yang beragama Islam merupakan mayoritas di Kalurahan tersebut sedangkan yang beragama Kristen tidak begitu banyak. Berikut jumlahnya dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.5 Umat beragama

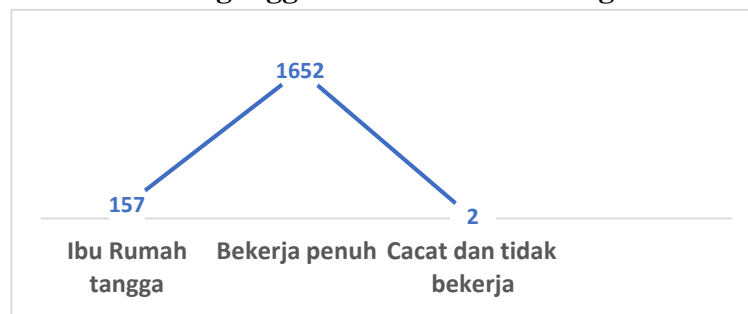
No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1655	1696	3351
2.	Kristen	45	59	104

Sumber: Profil Kalurahan Pengkok, 2022

4. Ekonomi Masyarakat

a. Pengangguran

Grafik II.I Pengangguran Berdasarkan Angkatan Kerja Dan Usia



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

Berdasarkan grafik ii.1 diatas, menjelaskan bahwa ekonomi masyarakat bagian pengangguran berdasarkan usia kerja 18-56 tahun pada Tahun 2022 di Kalurahan Pengkok. Dengan rincian kategori menjadi ibu rumah tanggal 157 orang, bekerja penuh 1652 orang, cacat dan tidak bekerja 2 orang dan. Jadi, total keseluruhannya 1811 orang.

b. Kesejahteraan Keluarga

Grafik II.2 Kesejahteraan Keluarga



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

c. Potensi Wisata

Wilayah Kalurahan Pengkok, memiliki keindahan suasana alam ciri khas layaknya daerah pedesaan meskipun letak kalurahan tersebut tidak jauh dari kota kabupaten. Kalurahan pengkok memiliki banyak potensi wisata yang sangat wajib dikunjungi saat berwisata ke Kota Yogyakarta. Kalurahan pengkok memiliki destinasi wisata berupa gunung yang meliputi, Wisata Hutan, Watu Ireng, dan Taman Nasional Bumi Perkemahan, Sungai Oya, Dan Jurug Gede. Tempat-tempat wisata tersebut sangat mudah dijangkau oleh wisatawan dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

a. Sosial

Kondisi sosial merupakan keadaan dimana masyarakat mengalami perubahan melalui proses sosial seperti interaksi sosial sesama warga masyarakat dan terjadilah proses sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kondisi sosial warga masyarakat Kalurahan Pengkok masih sangat penuh kebersamaan. Kebersamaan yang di rasakan seperti masih tingginya sikap gotong-royong, tolong menolong, rukun dan damai.

Hingga saat masyarakat Kalurahan Pengkok masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga jika ada terjadi masalah antar warga masyarakat Kalurahan Pengkok dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan melalui musyawarah dan mufakat. Selain itu juga, kondisi sosial seperti masalah

pendidikan, kesehatan, dan kasus narkoba hampir tidak pernah terjadi di Kalurahan Pengkok.

b. Ekonomi

Kalurahan pengkok memiliki potensi dalam berbagai bidang dengan sangat baik. Adanya potensi tersebut, guna meningkatkan taraf kehidupan terlebih khususnya tentang perekonomiannya. Wilayah Kalurahan Pengkok sendiri merupakan daerah yang tidak jauh dari kota Kabupaten dengan pusat kegiatan perekonomian yang memberikan peluang agar kehidupan masyarakatnya menjadi lebih maju dalam sektor apapun.

Dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat Kalurahan Pengkok mayoritas sebagai petani. Petani melalui hasil panenanya bisa membantu kendala kehidupan ekonomi yang dialami. Penghasilan dari pertanian yang didapatkan berupa : jagung, kedelai, kacang tanah, padi sawah dan ubi kayu.

Tabel II.6 Tanaman Pangan Menurut Komoditas

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Berat (Ton)
1.	Jagung	147.00 Ha	6.00 Ton
2.	Kacang Kedelai	30.00 Ha	1.50 Ton
3.	Kacang tanah	127.00 Ha	4.00 Ton
4.	Padi sawah	201.00 Ha	8.20 Ton
5.	Ubi kayu	118.00 Ha	12.00 Ton

Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

Berdasarkan tabel ii.6 diatas, menjelaskan bahwa, luas tanamanan pangan menurut komoditas pada tahun 2022 sebanyak lima jenis yaitu, jagung 147. Ha dengan hasil 6.00 ton, kacang kedelai 30.00 Ha dengan hasil 6.00 ton, kacang tanah 127.00 Ha dengan hasil 1.50 ton, padi sawah 201.00 Ha dengan

hasil 8.20 ton dan ubi kayu 118.00 Ha dengan hasil 12.00 ton. Maka luas tanah lebih banyak digunakan petani padi sawah sedangkan paling sedikit digunakan sebagai tempat menanam kacang kedelai.

c. Budaya

Penduduk Kalurahan Pengkok masih sangat kental budaya dan adat istiadatnya. Salah satu potensi budaya di bidang kesenian yang berada di wilayah tersebut dan paling paling banyak terkenal ialah Jatilan. Selain kesenian, disetiap padukuhan selalu melaksanakan Rasulan, upacara bersih desa, ruahan, yang dilaksanakan antara bulan Suro dan Sapar setelah panen.

6. Sarana dan Prasarana

1) Fasilitas Pendidikan

Infrastruktur pendidikan di Kalurahan lebih dari cukup untuk memberikan anak-anak pendidikan sebesar mungkin saat mereka mengejar pengetahuan. Fasilitas tersebut antara lain taman baca, perpustakaan desa, SD dan SMP, serta taman kanak-kanak. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas belum ada di Kalurahan Pengkok sehingga anak-anak harus keluar dari wilayah tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Tabel II.7 Fasilitas Pendidikan

NO.	Sarana Pendidikan	Total (unit)
1.	TK	3
2.	SD	3
3.	SMP	2
4.	Perpustakaan Desa	1
5.	Taman Baca	1

Sumber : Profil Kalurahan Pengkok 2022

Berdasarkan tabel ii.7 menjelaskan bahwa Kalurahan Pengkok belum memiliki fasilitas berupa SMA, sehingga anak-anak yang telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama harus keluar dari wilayah tersebut untuk melanjutkan pendidikan. Harapan secepatnya bisa dibangun SMA agar fasilitas pendidikan semakin lengkap.

2) Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah lokasi atau perangkat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan pemeriksaan maupun pengobatan bagi yang sakit. Kalurah Pengkok berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022 memiliki Masing-masing satu unit untuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Poliklinik, toko obat, dan Praktek Rumah Dokter. Fasilitas kesehatan sendiri memiliki dokter praktik, dua perawat, dan satu bidan.

7. Pemerrintahan Kalurahan Pengkok

1) Struktur Organisasi Kalurahan Pengkok

Bagan struktur organisasi Kalurahan Pengkok Tahun 2022



Gambar II.4 Struktur Organisasi

2) Visi dan Misi Kalurahan

a. Visi Kalurahan Pengkok

“Menjadikan Desa Pengkok Yang Sejahtera dan Berbudaya” Dari visi tersebut terdapat makna yang terkandung yaitu :

a) Kalurahan Pengkok Yang Sejahtera mengandung makna:

Tercukupnya kebutuhan dasar masyarakat baik secara lahir maupun batin ditandai dengan kecukupan kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan papan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, sikap saling menghormati dan menghargai, terciptanya

keadaan dan suasana yang kondusif serta menjunjung nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

b) Berbudaya mengandung makna :

Terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma masyarakat Desa Pengkok sehingga dapat menjadi masyarakat yang berbudi pekerti luhur yang terkandung dalam Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan norma-norma yang ada di masyarakat.

b. Misi Kalurahan Pengkok

a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan transparan

b) Meningkatkan profesionalisme kerja pegawai (Perangkat Desa)

c) Menggali dan megembangkan potensi sumber daya yang ada di Desa Pengkok

d) Mengoptimalkan peran pemuda (Karang Taruna) dalam membangun Desa Pengkok

e) Jujur, adil dan transparan dalam menggunakan anggaran dari pemerintah.

3) Karang Taruna

Berikut bagan Karang Taruna Kalurahan Pengkok :



Gambar II.5 Bagan Karang Taruna

B. Data Program Keluarga Harapan Kalurahan Pengkok

1. Jumlah Padukuhan yang Menerima Bantuan Manfaat PKH

Wilayah Kalurahan Pengkok memiliki enam Padukuhan, dalam data yang diterima keenam Padukuhan tersebut tercatat warga-warganya sebagai penerima bantuan manfaat program bantuan keluarga harapan. Padukuhan-padukuhan tersebut ialah:

- a. Padukuhan Ngembes
- b. Padukuhan Pengkok
- c. Padukuhan Kalinampu
- d. Padukuhan Srumbung
- e. Padukuhan Ngerancahan, dan
- f. Padukuhan Panjatan

2. Jumlah Penerima Bantuan

Berdasarkan informasi dari mitra PKH (Program Keluarga Harapan) wilayah Kalurahan Pengkok pada tahun 2022, terdapat 6 padukuhan yang terdaftar sebagai penerima bantuan manfaat. Enam padukuhan tersebut meliputi, Padukuhan Ngembes, Padukuhan Pengkok, Padukuhan Kalinampu, Padukuhan Srumbung, Padukuhan Ngeranchan, dan Pedukuhan Panjatan.

Masing-masing Padukuhan tersebut yang menerima bantuan manfaat ada laki-laki dan juga prempuan. Secara keseleuruhan warga masyarakat Kalurahan Pengkok yang menerima bantuan manfaat sejumlah 228 orang, yaitu 49 pria dan 179 jiwa prempuan. Orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah warga yang menerima bantuan dengan manfaat PKH. Selain itu juga, penerima tersebut masih menjadi warga Kalurahan Pengkok dan tercatat sebagai penduduk wilayah tersebut. Berikut akan dibuat dalam diagram tentang jumlah penerima bantuan manfaat dan penjelasannya.

Diagram II.4 Penerima Bantuan PKH



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

Pada tahun 2022, 228 orang akan mendapat manfaat dari Program Keluarga Harapan, termasuk 49 pria dan 179 wanita, menurut diagram iv.1 di atas. Dari data tersebut menunjukkan bahwa banyak penerima manfaat bantuan mayoritas adalah ibu-ibu. Data yang tertera diatas bukan dari satu padukuhan saja melainkan terbagi dalam enam (6) padukuhan yang berada di wilayah Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul DIY. Berikut ini, penerima manfaat bantuan program keluarga harapan (PKH) yaitu:

a. Padukuhan Ngembes

Dari data yang diterima dari staf berdasarkan profil Kalurahan Pengkok mengatakan bahwa, Padukuhan Ngembes yang terdaftar aktif menerima bantuan manfaat progra keluarga harapan sejumlah 28 jiwa. Warga masyarakatPadukuhan Ngembes yang terdaftar tersebut yaitu, 3 orang laki-laki dan 25 orangprempuan, berikut dibuatkan dalam bentuk digram:

Diagram II.5 Padukuhan Ngembes



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

b. Padukuhan Pengkok

Berbeda dengan Padukuhan Ngembes, Padukuhan Pengkok berjumlah lebih sedikit sebagai penerima bantuan manfaat PKH. Padukuhan ini, merupakan padukuhan dengan jumlah penerima paling sedikit yang terdaftar sebagai anggota penerima bantuan dengan jumlah 25 jiwa. 25 jiwa tersebut terbagi dengan 3 laki-laki dan 22 perempuan. Berikut dibuat dalam bentuk diagram.

Diagram II.6 Padukuhan Pengkok



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

c. Padukuhan Kalinampu

Padukuhan berikutnya adalah Padukuhan Kalinampu. Padukuhan ini, yang terdaftar sebagai penerima bantuan manfaat program keluarga harapan sebanyak 33 jiwa, yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Padukuhan Kalinampu sendiri masih sama seperti Padukuhan Ngembes dan pengkok. Kesamaannya mayoritas penerima bantuan adalah perempuan sedangkan laki-laki hanya beberapa orang saja. Berikut dibuatkan dalam bentuk diagram untuk jumlah penerima.

Diagram II.7 Padukuhan Kalinampu



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

d. Padukuhan Srumbung

Data yang diterima berikutnya adalah jumlah penerima bantuan manfaat program keluarga harapan dari Padukuhan Srumbung. Padukuhan Srumbung merupakan wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu 49 orang, yaitu 13 orang pria dan 36 orang jiwa. Berikut dibuat dalam bentuk diagram.

Diagram II.8 Padukuhan Srumbung



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

e. Padukuhan Ngerancahan

Padukuhan yang ke lima adalah Padukuhan Ngerancahan, wilayah ini terdaftar dengan penerima sebanyak 45 orang, yaitu 10 pria dan 35 perempuan. Berikut total tersebut dibuatkan dalam bentuk diagram.

Grafik II.3 Padukuhan Ngerancahan

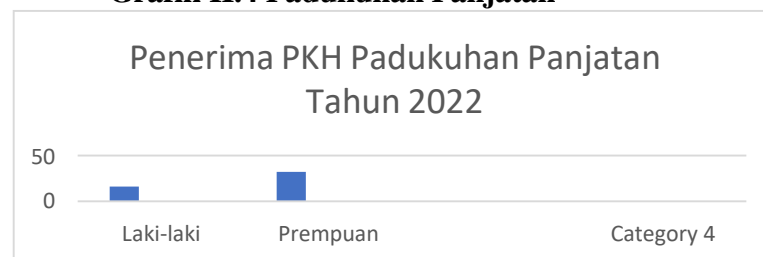


Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

f. Padukuhan Panjatan

Selanjutnya Padukuhan yang paling akhir ialah Padukuhan Panjatan. Wilayah tersebut yang terdaftar sebagai penerima bantuan manfaat sebanyak 48 orang hanya selisih satu orang saja dengan Padukuhan Srumbung. Terdiri dari 32 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Berikut dibuatkan dalam bentuk diagram.

Grafik II.4 Padukuhan Panjatan



Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

3. Nominal Bantuan Yang Diterima

Melihat data yang diperoleh dari pelaksana program keluarga harapan wilayah Kalurahan Pengkok nominal atau besaran dana yang diterima ada beberapa jenis dan penerimaanya 3 bulan sekali dalam satu tahun, total penerimaan 4 kali. Dalam penerimaan bantuan manfaat tersebut ada sedikit perbedaan yang mana untuk sembako diterima setiap bulan. Berikut jenis dan total biaya yang diterima, yaitu bantuan tunai untuk dibelikan sembako sejumlah Rp.2.400.000 diterima setiap bulan sejumlah Rp.200.000. Bantuan untuk bayi-balita sejumlah Rp.3.000.000, diterima setiap 3 bulan sekali sebesar Rp.750.000. Bantuan ibu hamil sejumlah Rp.3.000.000 yang diterima 3 bulan sekali sebesar Rp.750.000.

Sedangkan untuk biaya pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pendidikan SD, sebesar Rp.900.000 dan diterima setiap 3 bulan sebesar Rp.225.000. Pendidikan SMP sebesar Rp.1.500.00 dalam 3 bulan sekali diterima Rp.375.000, sedangkan untuk Pendidikan SMA, sebesar Rp.2.000.000 diterima dalam 3 bulannya sebesar Rp. 500.000. Terakhir bantuan untuk lansia sebesar Rp. 2.400.000 dan diterima setiap 3 bulan sebesar Rp.600.000. Berikut untuk nominal bantuan dibuatkan dalam bentuk tabel:

Tabel II.8 Tabel Nominal Penerimaan Bantuan PKH

No	Jenis Bantuan	Jumlah/Rp
1.	Komoditas	Rp. 2.400.000
2.	Bayi-balita	Rp. 3.000.000
3.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000
4.	SD	Rp. 900.000
5.	SMP	Rp. 1.500.000
6.	SMA	Rp. 2.000.000
7.	Lansia	Rp. 2.400.000

Sumber : Profil Kalurahan Pengkok, 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kalurahan Pengkok Kapanewon Patuk Kabupaten Gunung Kidul DIY maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Implementasi di Kalurahan Pengkok merupakan suatu pelaksanaan, tindakan yang dilakukan guna mencapai suatu tujuan. Implementasi PKH di Kalurahan Pengkok diawali dengan kegiatan praimplementasi guna melancarkan proses-proses selanjutnya. Pelaksanaan program tersebut sepenuhnya dijalankan berdasarkan tugas yang telah ditetapkan dari pusat. Dalam pengimplementasian ada banyak poin-poin yang ditemukan yaitu, kegiatan yang ditetapkan sebelum implementasi PKH, komunikasi pelaksana dengan penerima, proses implementasi PKH dan hambatan dalam pengimplementasian PKH. Program Keluarga Harapan ini, di Kalurahan Pengkok sangat terbantu dalam tiga komponen yaitu : Kesehatan, untuk ibu hamil dan bayi-balita, Pendidikan untuk anak SD, SMP dan SMA. Ketiga komponen Kesejahteraan yaitu Lansia diatas 60 tahun. Proses implementasi bisa tergolong berhasil dengan melihat berkurangnya penerima PKH

dalam setiap tahapan pada tahun 2022. Hal tersebut terlihat ada 42 KPM PKH dalam 4 tahap berkurang karena graduasi mandiri yang artinya tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH lagi.

2. Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditemui hambatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Dirasakan oleh Pendamping karena masih ada KPM PKH yang tidak menaati aturan, seperti malas untuk mengikuti pertemuan wajib dalam sebulan sekali yang berikan oleh pendamping.
 - b. Dirasakan oleh KPM PKH yaitu berkaitan dengan waktu pencairan yang seringkali tunda, dan juga berkaitan dengan perpindahan tempat penarikan uang yang awalnya dari Bank Mandiri dipindahkan ke kantor POS.
 - c. Dirasakan oleh aparat kalurahan yaitu berkaitan dengan tidak normalnya data pengaduan dari hasil pemuktahiran data yang diupload dan data yang diterima dari pusat tidak sesuai. Sehingga terjadinya tidak tepat sasaran pada program tersebut.

B. Saran

Peneliti ingin menawarkan ide-ide berikut berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan penelitian, yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Pengkok Kapanewon Patuk Gunung Kidul Kabupaten DIY.

- a. Untuk Pendamping PKH, yang mana sebagai penuntun KPM PKH sebaiknya lebih tegas lagi kepada anggota KPM PKH agar semakin giat dan rajin untuk

mengikuti segala aktifitas yang berkaitan dengan PKH ini. Selain itu, sebaiknya dalam pemuktiharan ataupun pengaduan nana-nama baru sebagai calon KPM PKH ada baiknya dengan mendata bukan hanya satu dua kali saja dalam sebulan minimal lebih dan harus mengunjungi rumah calon KPM tersebut untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarganya.

- b. Untuk Keluarga Penerima Manfaat jangan menjadikan bantuan PKH ini sebagai bantuan untuk menggaji biaya hidup KPM. Harus tetap mencari pekerjaan ataupun pengasilan lainn untuk menambah kebutuhan keluarga masing-masing. Pakailah bantuan tersebut sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditentukan.
- c. Untuk aparat Kalurahan, terlebih khusus yang terlibat dalam Implemetasi program keluarga harapan untuk bekerja lebi keras dalam mendaftarkan calon-calon KPM PKH baru yang sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah juga harus menjalin kerjasama yang baik dan kompak dengan Pendamping, agar program ini berjalan dengan baik dan membantu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Agustino, Leo. 2008 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, : Bandung Alfabeta Budi
Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita : Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta:
Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*.
Bandung: Mizan.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, D.J.P. dan J.S.K.S.R. (2021) *pedoman PKH
2021*. PENDAMPING, B.K. and DIREKTORAT, D.O.P.
(2015) ‘Buku kerja’
- Harbani Pasalong, M. (2020) *METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK*.
Bandung: Alfabeta.
- Junanah, et al. 2022. Penerbit Indonesia Imaji *Imajinasi Dan Refleksi Kritis
Pengembangan Pendidikan Islam*. Trenggalek.
- Muhammad, Kusumantoro Sri. *Kajian-kajian Ilmu sosiologi*. Klaten : Cempaka
Putih. 2019.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan
Apilkasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*,. Bandung :
Alfabeta.
- Mulyanto Sumardi & Hans Dieter Evers. 1982. *Kemiskinan dan Kebutuhan
Pokok*, Jakarta:CV Rajawali Citra Press.
- Sugiyono. 2009 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Undang-undang :

INDONESIA, D.J.P.P.-U.K.H.D.H.A.M.R. (2017) ‘PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN’, pp. 1–14.

Republik Indonesia. 1974. “ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974;Tentang Pokok Pokok Kesejahteraan Sosial.” : 1–5.

UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosisal Nasional.

Sumber lain

Jurnal :

Afiful Ikhwan. 2016. *Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist)*, EDUKASI, Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 04, Nomor 01.

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Bandung: Mizan.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, D.J.P. dan J.S.K.S.R. (2021) *pedoman PKH 2021*. PENDAMPING, B.K. and DIREKTORAT, D.O.P. (2015) ‘Buku kerja’

Nazira, I. *et al.* (2022) IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI GAMPONG TRIENG MATANG UBI KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA’, *Jurnal Ilmial*

Mahasiswa FISIP USK, Volume 7.

Supardal, 2007. Desa dan Jaring-jaring kemiskinan. Jurnal Ilmu Sosial Alternatif. Vol VIII No (1) : 80. APMD, Yogyakarta.

Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-11.

Skripsi :

Pratiwi, K.I. (2018) Keluarga-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta

Internet :

Asian Development Bank. (2018). *Republic of Indonesia: Building inclusive social assistance* <https://www.bkkbn.go.id/>. (2011). *Batasan dan Pengertian MDK*. <https://www.bkkbn.go.id/>. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

Pratama, C.D. (2020) *Pengolahan Data dalam Penelitian Sosial*, *kompas.com*. Available at:<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/05/172105069/pengolahan-data-dalam-penelitian-sosial?page=all> (Accessed: 31 January 2023).

Sendari, A.A. (2021) *PKH adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran, dan Cara Ceknya*, *Liputan6.com*. Available at: <https://www.liputan6.com/hot/read/4588463/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya> (Accessed: 10 January 2023).

Susanto, I. (2019) *Program Keluarga Harapan (PKH)*, *kemensos.go.id*. Available at: <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> (Accessed: 15 November 2022)

LAMPIRAN FOTO

1. Wawancara Bersama Lurah Kalurahan Pengkok (Bapak Sugit)



2. Wawancara bersama Kasi Kesejahteraan (Bapak M.Nashrul Ikwan)



3. Wawancara bersama Pendamping PKH (Ibu Niki Sara Pratitasari S.Pd)



4. Wawancara bersama ketua PKH juga sebagai KPM PKH (Ibu Retno Astuti)



5. Wawancara bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH

a. Ibu Sukaningsih



b. Mbah Juminten



c. Ibu Setiati



d. Bapak Ngaliman



6. Kegiatan Sosialisasi Rutin Selama Sebulan Sekali



7. Penerimaan Bantuan Atau Penyaluran Bantuan



8. Kartu Keluarga Sejahtera Untuk Mengambil Uang Bantuan



PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pelaksana/Pendamping PKH

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan akhir :

1. Sejak kapan pelaksanaan PKH diteriama oleh warga masyarakt kalurahan Pengkok?
2. Apa yang bapak/I lakukan sebelum penentuan penerima bantuan manfaat PKH diberikan kepada petugas pendataan yang akan menrima bantuan?
3. Apakah pelaksanaan penerima bantuan manfaat PKH sudah berjalan dengan baik ataukah masih ada kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana tahapan dari pelaksanaan PKH yang sudah berjalan ?
5. Apakah menurut bapak/I penerima bantuan ini sudah tepat sasaran ataukah belum, jika belum seperti apakah yang harus dikatakan tepat sasaran?
6. Berapa kali penerima mendapatkan bantuan, diteriam setiap bulan atau ada jangka waktu tertentu?

7. Apakah besar bantuan yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan yang telah ditentukan atau masih ada potongan?
8. Apakah pelaksanaan PKH ini sudah efektif dijalankan?
9. Apakah Bapak/I turun kelapangan untuk memantau kondisi masyarakat penerima PKH ini?
10. Menurut bapak/I sebagai pelaksana PKH hasil seperti apa yang ingin dicapai?
11. Dari pelaksanaan PKH ini apakah bapak/I berpikir atau menilai tujuan dari implementasi Program Keluarga Harapan ini akan seperti apa nantinya?
12. Apa saja yang menjadi manfaat dari pelaksanaan PKH ini?
13. Bagaimana cara bapak/I sebagai pendamping/pelaksana mengkomunikasikan tentang PKH kepada penerima bantuan?
14. Dengan adanya PKH ini, apakah menurut bapak/I penerima bantuan manfaat PKH akan sejahtera?
15. Dalam bentuk apa saja bantuan yang diterima oleh penerima manfaat PKH?

B. Untuk aparat desa

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan akhir :

1. Sejak kapan pelaksanaan PKH di Kalurahan Pengkok?
2. Bagaimana menurut bapak/I tentang pelaksanaan PKH di Kalurahan Pengkok?
3. Bagaimana perkembangan pelaksanaan PKH hingga saat ini
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan PKH ini? dan apakah pihak-pihak yang terlibat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
5. Seperti apa komunikasi antara bapak/I dengan pelaksana PKH dalam melaksanakan program?
6. Menurut bapak/I seperti apa hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKH ini?
7. Apakah Bapak/I turun kelapangan untuk memantau kondisi masyarakat penerima PKH ini?
8. Apa saja tujuan dengan adanya Program Keluarga Harapan diberikan kepada penerima manfaat?
9. Dalam implementasi PKH, apakah hanya penerimaan bantuan saja yang dilakukan ataukah ada kegiatan lain?
10. Dalam bentuk apa saja bantuan yang diterima oleh penerima manfaat PKH?

C. Untuk penerima PKH

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan akhir :

1. Apakah bapak/I mengetahui tentang PKH?
2. Dari mana bapak/I memperoleh informasi mengenai tentang PKH?
3. Sudah berapa lama bapak/I menerima bantuan manfaat PKH?
4. Sesudah bapak/I terdaftar sebagai penerima bantuan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan?
5. Dalam penerimaan bantuan PKH, apakah bapak/I mendaftar sendiri ke pemerintah Kalurahan ataukah ada petugas yang mendata?
6. Bagaimana tanggapan bapak/I terhadap implemntasi PKH yang diberikan pemerintah kepada penerima bantuan manfaat PKH?
7. Harapan, apakah besarnya dana bantuan tersebut sudah memadai?
8. Menurut bapak/I apakah petugas pelaksanaan PKH sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
9. Apakah ada kendala pada proses implementasi program keluarga harapan?
10. Seperti apa komunikasi yang diberikan kepada bapak/I sebagai penerima bantuan manfaat PKH?
11. Apakah dengan adanya PKH ini bisa membantu kehidupan bapak/I sejahtera?
12. Apa saja manfaat yang didapatkan dengan adanya PKH ini?
13. Berapa kali bapak/I menerima bantuan PKH?
14. Dalam implementasi PKH, apakah hanya penerimaan bantuan saja yang dilakukan ataukah ada kegiatan lain?
15. Dalam bentuk apa saja bantuan yang diterima oleh penerima manfaat PKH?